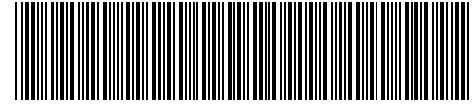




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693054/2025**



DS:4254-0544-0292-6542

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 3. Provinsi : (28) MALUKU UTARA
 4. Kode/Nama Satker : (693054) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
- Sebesar : Rp. 502.000.000 (LIMA RATUS DUA JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.03.BB Program Pembentukan Regulasi
135.03.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 502.000.000
Rp. 502.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	502.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN T E R N A T E (062) Rp. 502.000.000

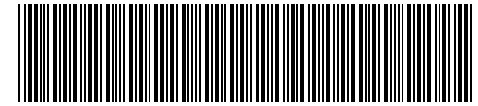
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693054/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4254-0544-0292-6542

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (693054) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi			502.000.000
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			502.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan			
		2. 01	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	17,00	Rekomendasi Kebijakan	337.564.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	17,00	Rekomendasi Kebijakan	337.564.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	12,00	Orang	149.646.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	12,00	Orang	149.646.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	14.790.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	1,00	Laporan	14.790.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

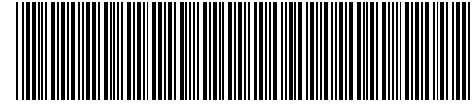
ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.03.2.693054/2025

I B. SUMBER DANA



DS:4254-0544-0292-6542

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 Provinsi : (28) MALUKU UTARA
 Kode>Nama Satker : (693054) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	502.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	502.000.000		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693054/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4254-0544-0292-6542

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (693054) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693054	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA	-	502.000	-	-	-	502.000		
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	502.000	-	-	-	502.000		
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	502.000	-	-	-	502.000		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (28.00 MALUKU UTARA / MALUKU UTARA)	-	337.564	-	-	-	337.564	28 .00	
01	RM	-	337.564	-	-	-	337.564	062@	
7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (28.00 MALUKU UTARA / MALUKU UTARA)	-	149.646	-	-	-	149.646	28 .00	
01	RM	-	149.646	-	-	-	149.646	062@	
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (28.00 MALUKU UTARA / MALUKU UTARA)	-	14.790	-	-	-	14.790	28 .00	
01	RM	-	14.790	-	-	-	14.790	062@	
JUMLAH		-	502.000	-	-	-	502.000		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693054/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4254-0544-0292-6542

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (28) MALUKU UTARA
Kode>Nama Satker : (693054) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

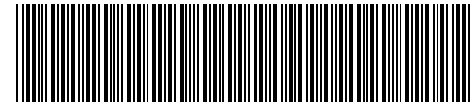
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693054	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	4.417	69.296	69.296	69.296	62.630	62.630	3.026	146.320	300	1.270	13.220	300	502.000
		BELANJA BARANG	4.417	69.296	69.296	69.296	62.630	62.630	3.026	146.320	300	1.270	13.220	300	502.000
	135.03.BB.7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	4.417	69.296	69.296	69.296	62.630	62.630	3.026	146.320	300	1.270	13.220	300	502.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	4.417	69.296	69.296	69.296	62.630	62.630	3.026	146.320	300	1.270	13.220	300	502.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693054/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4254-0544-0292-6542

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [28] MALUKU UTARA
Kode dan Nama Satker : [693054] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693054	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 219.184		
	52 Belanja Barang Rp. 219.184		
135.03.BB 7129	Program Pembentukan Regulasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 123.555 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.894 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 63.405 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.180 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693054/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:4254-0544-0292-6542

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [28] MALUKU UTARA
Kode dan Nama Satker : [693054] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001